

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat PILKADA merupakan agenda politik yang sangat penting bagi masyarakat daerah. Peranan pilkada sebagai sarana dalam memilih pemimpin di daerah memberikan dampak penting bagi kemajuan Indonesia. Proses pemilihan kepala daerah dulu dilaksanakan oleh DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun, Sejak berlakunya Undang-Undang no. 32 tahun tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, masyarakat dapat memilih langsung Kepala daerah yang mereka kehendaki. Partisipasi masyarakat daerah menjadi penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Dengan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat, membuat peluang suatu daerah untuk maju dan sejahtera lebih terbuka, karena tentunya Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang terpilih nantinya akan sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat yang memahami kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan.

Ada berbagai contoh yang telah membuktikan bahwa dengan hasil Pilkada langsung oleh masyarakat dapat memajukan daerah tersebut melalui pemimpin yang terpilih. Salah satu contoh kepala daerah yang sukses adalah Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya. Surabaya sukses meraih piala Adipura berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2017, Wali Kota Risma juga berhasil menutup kawasan prostitusi Gang Dolly yang berdampak buruk kepada masyarakat

(Liputan6.com,2019). Tak berhenti sampai disitu, Wali kota yang juga merupakan kader PDI-P ini juga seringkali dundang menjadi pembicara di berbagai negara untuk menceritakan inovasi serta kisah suksesnya membangun surabaya (Kompas.com,2019). Selain Risma, ada beberapa nama lain seperti Hasto wardoyo mantan Bupati Kulon Progo yang berhasil mengangkat kekuatan ekonomi lokal dengan mensupport UMKM agar dapat memproduksi barang. Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang mampu meningkatkan sektor pariwisata di kota Banyuwangi (Jawapos,2018).

Berdasarkan bukti-bukti yang telah disebutkan diatas, selain faktor masyarakat sebagai pemilih ada peran yang sangat signifikan dari partai politik dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Menjadi Seorang pemimpin sebelum menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, ia perlu teruji dan terseleksi di kehidupan partai politik sebagai sarana dan tempat memahami persoalan negara, praktek menjadi pemimpin dan berlatih mendengar aspirasi masyarakat (Hendarto, 2006:313). Hendarto kemudian melanjutkan “ setelah melalui proses tersebut, dan telah diyakini siap oleh partai politik yang bersangkutan, ia akan dicalonkan menduduki jabatan-jabatan publik seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota” (2006:313). Melihat bagaimana peran kaderisasi partai politik yang sangat berpengaruh dalam mencetak pemimpin, proses rekrutmen dalam hal ini menjadi poin kunci suksesnya kaderisasi. Firmansyah dalam Adnan (2018) mengatakan Rekrutmen Partai Politik merupakan hal penting, karena proses ini yang menentukan siapa saja orang yang akan menjalankan sistem pemerintahan. Tercapai atau tidaknya tujuan dari sistem

politik tergantung dari kualitas proses rekrutmen politik. Kualitas tersebut bisa dipertimbangkan melalui apakah proses tersebut dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak serta menempatkannya pada jabatan yang sesuai atau tidak.

Rekrutmen oleh partai politik menjadi hal yang sangat krusial bahkan di lingkup kecil setingkat Kabupaten. Kabupaten Bulungan terletak di Provinsi Kalimantan Utara telah melangsungkan gelaran Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati ikut berkontestasi pada pesta demokrasi ini yang. Partai Gerindra mengusung pasangan calon nomor urut 4, yakni Djoko Susilo dan Kosmas Kajan. Gerindra sendiri diketahui sebagai pemenang kursi legislatif di DPRD Kabupaten Bulungan dengan 4 kursi dari total 25 kursi yang ada. Untuk mengusung sepasang calon kepala daerah diperlukan minimal 5 kursi DPRD, oleh karena itu pada Pilkada serentak 9 Desember 2020, Partai Gerindra mengajak dan berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Bulungan. Satu hal menarik yang ada pada pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PBB ini terdapat pada calon bupati Djoko Susilo. Berdasarkan sumber informasi yang diberitakan oleh korankaltara.com tanggal 11 september 2019, disebutkan bahwa Djoko Susilo telah memberikan formulir pendaftaran kepada DPC PDI-P Kabupaten Bulungan. Berita ini diperkuat oleh informasi selanjutnya yang bersumber dari tribunkaltim.co yang menyebutkan Joko Susilo merupakan kader PDI-P. Sementara itu calon Wakil Bupati Kosmas Kajan Merupakan kader Partai Geirndra.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Riswana (2018:18) rekrutmen politik adalah proses seleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan memfokuskan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan yang cukup menonjol partai politik menyeleksi dan menempatkan sebagai seorang calon pemimpin. Berdasarkan kasus yang terjadi pada Partai Gerindra Kabupaten Bulungan dalam menetapkan calon bupati, Partai Gerindra tidak menempatkan kader partai sendiri sebagai pucuk pimpinan. Lemahnya proses rekrutmen dan kaderisasi mengakibatkan Partai Gerindra Kabupaten Bulungan belum memiliki kader yang siap untuk menduduki kursi Bupati dan merekrut politisi dari partai lain. Calon Bupati Djoko Susilo merupakan Kader PDIP, PDIP tentunya memiliki visi-misi dan tujuan yang berbeda dengan Partai Gerindra. Sehingga yang ditakutkan adalah seandainya Djoko Susilo terpilih sebagai Bupati, terjadi ketidak sesuaian dalam menempatkan posisi jabatan yang akan berdampak pada proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Bulungan. Labolo dan Ilham dalam Suhaimi (2018:107) mengatakan “perpindahan kader partai politik dari satu partai ke partai lainnya menjadi bukti lemahnya sistem rekrutmen dan pengkaderan yang menyebabkan lunturnya ideologi partai politik”. Oleh karena itu penulis ingin mencari tahu lebih mendalam tentang proses dan strategi rekrutmen calon Bupati oleh Partai Gerindra beserta hal-hal yang menjadi pertimbangannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Rekrutmen Politik Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Merekrut Calon Bupati Kabupaten Bulungan dalam Pilkada tahun 2020?
2. Apa saja Strategi yang digunakan Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Proses Rekrutmen Calon Bupati Bulungan dalam Pilkada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen Politik Partai Gerakan Indonesia raya dalam melakukan rekrutmen terhadap Calon Bupati Kabupaten Bulungan dalam Pilkada tahun 2020
2. untuk mengetahui strategi yang digunakan Partai Gerakan Indonesia Raya dalam proses rekrutmen Calon Bupati Kabupaten Bulungan dalam Pilkada tahun 2020

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan rekrutmen politik
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi partai politik dan politisi dalam mengetahui proses dan startegi rekrutmen politik yang baik dengan segala kekurangannya.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian tentang rekrutmen politik berikutnya yang relevan dan konkrit

D. Manfaat Praktis

- a. Hasil penilitan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bulungan dan partai politik lainnya dalam melakukan rekrutmen politik yang baik.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tentang proses dan strategi rekrutmen politik dalam sebuah partai politik.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Islam Nuralamsyah (2018) dengan judul Peran Partai Politik DPC PDI-Perjuangan Dalam Proses Rekrutmen Politik Calon Bupati Tahun 2017, proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC PDI-P Pati hanya tinggal mendaftarkan bakal calon Bupati dan kemudian disetorkan ke DPP pusat. Setelah disetujui oleh DPP pusat, DPC PDI-P menyetorkannya ke KPUD Pati. Hal ini sebabkan PDI-P Pati telah memiliki seorang kader yang selain mengakar serta juga dapat diterima oleh masyarakat dan dituntut untuk memiliki kemampuan dan kualitas menduduki jabatan-jabatan strategis pada lembaga-lembaga pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrarto (2006) menemukan bahwa Partai Politik merupakan saluran utama dalam memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen politik

tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu masyarakat seharusnya diperbolehkan untuk mengakses Partai Politik tersebut, agar calon yang diusulkan oleh partai politik penentuannya dapat dilaksanakan demokratis dengan lebih terbuka dan transparan, meskipun hal tersebut merupakan urusan internal partai politik.

”Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Andari (2018) dengan judul Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penentuan Caleg Perempuan Pada Pileg 2014, PKS memakai pola rekrutmen tertutup dimana kader partai tidak bisa untuk mencalonkan diri melainkan harus dicalonkan oleh partai, dan kader harus menaati keputusan partai. Tahapan-tahapan rekrutmen tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui sistem penilaian yang digunakan partai dalam menentukan calon legislatif. PKS juga melakukan perekrutan caleg non kader dengan pertimbangan caleg tersebut mempunyai misi yang sama, dianggap mampu baik dalam pendidikan agama maupun pendidikan politik serta memperhatikan bagaimana cara caleg bermasyarakat, mempunyai akhlak yang baik, memiliki kecukupan modal dan mendapat izin dari suami jika calon tersebut perempuan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi (2018) dengan judul Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menemukan bahwa rekrutmen ideologis yang merupakan rekrutmen politik yang didasarkan pada ideologi partai politik menjadi sumber materi pendidikan, sumber program aktivitas politik dan dasar bagi pengambilan kebijakan politik. Rekrutmen politik ideologis dilakukan oleh partai

politik yang menjadikan dasar aktivitas partainya bergantung pada ideologi tertentu. Ideologi yang dipakai oleh partai politik yakni ideologi agama (islam), nasionalis, dan sebagainya. Rekrutmen politik ideologi membentuk pola rekrutmen yang terstruktur dan sistematis. Pola rekrutmen itu bisa dilihat dari mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan secara terus menerus, terkoordinir, terevaluasi, dan berjenjang. Sebaliknya pada rekrutmen yang tidak didasarkan pada ideologi, partai politik mendasarkannya pada kepentingan tertentu atau berdasarkan atas kemanfaatan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Remon (2019) yang berjudul Rekrutmen Politik (Studi tentang Pola Rekrutmen PDI Perjuangan dalam Pencalonan Anton Charliyan sebagai Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018). Pola Rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Anton Charliyan sebagai Wakil Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat Melibatkan DPD PDI Perjuangan dalam hal sertifikasi, akan tetapi proses nominasi dan penyeleksian hanya dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan. Ada peran elit partai dalam memengaruhi putusan Anton Charliyan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat 2018. Hal ini bisa ditemukam dari rekrutmen tertutup yang dilakukan PDI Perjuangan yang hanya melibatkan petinggi partai tertentu atau sedikit orang dalam struktur partai yang dalam hal ini adalah DPP PDI Perjuangan. DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sebagai wilayah pemilihan tidak diikutsertakan baik dalam penominasian maupun penyeleksian.

Penelitian selanjutnya oleh Anggoro (2020) berjudul Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat

Nasional Pada Pemilu Pilkada Di Kota Tasikmalaya tahun 2017). Penelitian ini melihat rekrutmen politik melalui sudut seleksi kandidat. Tidak dimajukannya kader internal sebagai calon kepala daerah oleh PAN tidak disebabkan oleh kader yang kurang berkualitas. Namun, penyeleksian kandidat dipengaruhi oleh *local strong man*, dan kekuatan finansial besar. Ini berarti pada Partai Amanat Nasional, keputusan penentuan bakal calon kepala daerah ada pada rapat pleno pusat, yang menunjukkan partai ini bersifat elitis non prosedural. Tidak ada prosedur yang baku dalam pelaksanaan rekrutmen politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansya (2018) berjudul Rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Kabupaten Takalar 2017. Proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh PKS dalam menentukan calon kepala daerah kabupaten Takalar merupakan proses politik yang dibangun dengan sangat baik dengan munculnya kader terbaik PKS dengan elektabilitas yang dapat bersaing dengan elektabilitas yang dimiliki oleh calon petahana dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Takalar.

Penelitian oleh Suyide (2013) dengan judul Rekrutmen Politik Kepala daerah Kota Surabaya 2010 (Studi Dinamika Rekrutmen Politik Calon Walikota Surabaya di Internal DPC PDI-Perjuangan). Hasil Rakercabsus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada 18 Agustus 2009 merekomendasikan 3 nama untuk maju dalam pemilihan wali kota. Tiga nama itu yakni Bambang DH, Saleh Mukadar, dan Wisnu Bakti Buana. Akan tetapi, tanpa melalui Rakercabsus terbit rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP dengan putusan calon Walikota yakni Tri Rismaharini dan Wakil Walikota Bambang DH, dimana disebutkan bahwa

nama Risma tidak muncul dari tingkat DPC. Oligarki pada putusan partai tersebut dapat diketahui karena kuatnya dominasi partai politik pada tingkat pusat, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan partai politik masih dikelola secara sentralistik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014) berjudul Rekrutmen Politik Calon Kepala daerah Kabupaten Tanggamus Oleh Partai Golkar Tahun 2012 menemukan bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Tanggamus dengan cara membuka pendaftaran secara umum, penentuan bakal calon diputuskan pada rapat tim Pilkada pusat yang hanya melibatkan perwakilan pengurus partai dan tidak terbuka bagi masyarakat umum. Penentuan calon dari Partai Golkar didasarkan pada hasil survei yang direkomendasikan oleh DPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2018) dengan judul Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Golkar Tahun 2017). Proses Seleksi bakal calon dilaksanakan oleh tim Pilkada dengan merekrut seluruh bakal calon yang potensial. Penetapan dilakukan berdasarkan mekanisme partai dengan penetapan oleh lembaga survei yang telah ditunjuk oleh DPP. Selain itu pertimbangan lain juga didasarkan pada kemauan masyarakat dan kecakapan calon yang bersangkutan. Mekanisme rekrutmen politik kepala daerah dari partai Golkar telah sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat memberikan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan beberapa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam menentukan calon kepala daerah berdasarkan pada kualitas dan elektabilitas calon, sehingga tidak jarang rekrutmen politik yang dilakukan menghasilkan terpilihnya kandidat dari kalangan profesional (non parpol) seperti tokoh masyarakat dan mantan anggota ASN yang dianggap cukup berprestasi. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra yang terkenal dengan ketokohan elite politik yang ada pada Ketua Umum Prabowo Subianto dapat mempengaruhi keputusan partai ditingkat daerah. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas proses rekrutmen politik Partai Gerindra Kabupaten Bulungan dan hal-hal yang dipertimbangkan dengan terpilihnya calon kepala daerah yang diusung mantan kader PDI-P dan memiliki jabatan yang cukup tinggi di partai sebelumnya, serta mengapa Partai Gerindra tidak mencalonkan kader sendiri dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

F. Landasan Teori

1. Partai Politik

Definisi partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dengan cara yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik yang ada pada masyarakat dengan cara yang sah melalui sebuah pemilu (Hidayat, 2013). Selanjutnya Hidayat juga menjelaskan bahwa partai politik merupakan kelengkapan dan syarat yang ada di sebuah negara demokrasi

yang memerlukan partai politik yang bebas dan baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya (Hidayat, 2013).

Partai Berasal dari kata “Part” yang memiliki arti “bagian” yang merujuk kepada warga negara, sementara itu “partai” menunjukkan kepada sekelompok orang. Jadi merujuk pada sekelompok dan kumpulan warga dalam sebuah negara yang digabungkan atas satu kesatuan dengan memiliki tujuan tertentu (Badudu&Zain, 2001). Selanjutnya penjelasan arti kata “politik” yang berasal dari kata “Polis” berarti kota yang berstatus sebagai negara. Seperti yang dikatakan oleh Arifin bahwa politik adalah segala aktifitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya di sebut “politieke techne” politika (Arifin, 2002).

Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitsional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008).

Kemudian berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2011 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan secara sukarela sekelompok warga negara indonesia membentuknya dengan dasar cita-cita dan kehendak untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi yang disebut dengan partai politik adalah suatu organisasi politik yang terstruktur dan terorganisir serta memiliki cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

2. Rekrutmen Politik

Partai politik mempunyai berbagai fungsi, salah satu diantaranya adalah fungsi partai politik untuk melakukan rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen politik terdiri atas seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada didalam pemerintahan. Oleh sebab itu partai politik memerlukan anggota kader yang mempunyai kualitas untuk menduduki kursi di pemerintahan. Dengan memiliki anggota-anggota yang berkualitas, partai politik dapat mengajukan sosok pemimpin sendiri dan memiliki kesempatan agar bisa mengajukan calonnya ke ranah kepemimpinan lokal maupun nasional (Surbakti,2010).

Rekrutmen politik merupakan sebuah proses yang mendudukan seseorang pada jabatan politik setelah seseorang tersebut benar-benar teruji kredibilitas dan kualitasnya. Rekrutmen yang dilakukan partai politik memiliki dampak logis dalam memenuhi keberlanjutan sistem politik agar tercipta sebuah sistem politik yang maju dan berkembang (Qodir, 2001).

Miriam Budiardjo menjelaskan rekrutmen politik adalah proses dimana partai politik merekrut anggota baru dan mengikutsertakan orang yang kompeten dan berbakat untuk turut serta berpartisipasi pada kancah perpolitikan. Dari

penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Miriam Budiardjo menganggap proses rekrutmen politik adalah cara partai politik untuk mencari suksesor atau penerus (Budiardjo, 1981)

Miriam Budiardjo, mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Budiardjo, 1981). Dari definisi yang diungkapkan di atas dapat tergambar bahwa Miriam Budiardjo lebih menekankan proses rekrutmen politik ditempuh sebagai upaya mencari anggota baru dengan maksud menjaga kelangsungan hidup partai.

a. Proses Rekrutmen Politik

Menurut Almod dan Powell dalam Prihatmoko (2005) mengatakan bahwa terdapat dua jenis rekrutmen politik, yaitu:

1. Rekrutmen tertutup

Adalah cara rekrutmen kandidat dimana hanya segelintir orang saja yang dapat menentukan, biasanya orang-orang ini adalah elit partai politik yang memiliki pengaruh luar biasa dalam partai. Rekrutmen secara tertutup sering kali dianggap sangat tidak demokratis karena tidak mengikutsertakan seluruh jajaran partai dan hanya bergantung pada elit partai.

2. Rekrutmen terbuka

Adalah cara memilih kandidat yang menjunjung asas demokrasi. mekanisme rekrutmen ini mengikut sertakan seluruh jajaran dan lapisan partai politik mulai dari tingkat bawah hingga pusat. Mekanisme ini mengutamakan

kesamaan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi partai.

Menurut Rahat dan hazan dalam Pamungkas (2012) mengatakan terdapat 4 faktor penting yang dapat menunjukkan bagaimana proses rekrutmen yang terjadi pada partai politik yaitu :

1. Siapa kandidat yang bisa dinominasikan (Candidacy), partai politik memberikan beberapa persyaratan tambahan diluar yang ditentukan oleh negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan dasar bagi perorangan yang boleh menominasikan diri seperti status kewarganegaraan, tempat tinggal, usia, jumlah dukungan dan sebagainya
2. Siapa yang menyeleksi (Selectorate), penyeleksi adalah sekelompok maupun perorangan yang ditugaskan untuk menyeleksi kandidat
3. Dimana kandidat diseleksi, secara ringkas kandidat dapat diseleksi pada tingkat nasional maupun tingkat daerah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Bagaimana kandidat diputuskan, ada dua model dalam proses memutuskan yaitu model pemilihan (Voting) dan model penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi, sementara pada sistem penunjukkan penetusn kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

G. Definisi Konseptual

1. Partai politik

Partai Politik adalah organisasi politik yang terdiri dari sekelompok orang terorganisir dengan anggota-anggota yang mempunyai pemahaman, ideologi dan cita-cita yang sama untuk tujuan mendapatkan kekuasaan jabatan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional

2. Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ada banyak, salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik. rekrutmen politik adalah proses partai politik untuk merekrut anggota baru, partai politik biasanya mencari dan mengajak orang-orang yang dianggap berkompeten dan berkualitas untuk dijadikan anggota serta turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Selain kredibilitas, rekrutmen politik juga akan mempertimbangkan loyalitas calon anggota baru guna menjaga keberlangsungan aktivitas partai.

H. Definisi Operasional

1. Hal Penting yang harus diperhatikan dalam rekrutmen partai politik

1.1 Siapa kandidat yang dinominasikan ?

- a. Apakah ada persyaratan dalam menominasikan kandidat ?
- b. Jika iya, apa saja syarat-syarat tersebut?
- c. Seberapa besar pengaruh syarat-syarat ini terhadap kandidat yang potensial ?

1.2 Siapa yang menyeleksi ?

- a. Apakah ada persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kandidat ?

- b. Jika iya, apa pengaruhnya terhadap anggota yang melakukan seleksi?

1.3 Dimana Kandidat di seleksi ?

- a. kandidat dipilih oleh struktur partai di tingkat nasional atau sub nasional ?
- b. Jika di sub nasional, dipilih oleh struktur tingkat provinsi atau kabupaten/kota ?

1.4 Bagaimana kandidat diputuskan ?

- a. Apakah melalui voting atau melalui penunjukkan ?

I. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak boleh mengabaikan bagaimana metode penelitiannya dibuat. Jika ingin sebuah penelitian berjalan dengan baik, perlu memperhatikan metode penelitian yang akan digunakan sebagai dasar landasan dalam memenuhi hal-hal yang diinginkan. Pada metode penelitian, terdapat beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Antara lain seperti data, tujuan, cara serta kegunaan. Tiap-tiap penelitian mempunyai metodenya masing-masing untuk mengkaji sebuah permasalahan. Maka dari itu, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini akan diuraikan serta dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah metode kualitatif, jadi model penelitian yang akan dipakai yaitu model penelitian deskriptif analisis, yang mana pada penelitian ini penulis berusaha melakukan analisa mengenai rekrutmen politik Partai Gerindra terhadap calon Bupati Kabupate Bulungan dalam pilkada serentak tahun 2020. Penelitian tentang Rekrutmen Politik Partai Gerindra terhadap calon bupati Kabupaten Bulungan dalam Pilkada 2020 relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan, bagaimana mereka melakukan proses rekrutmen, apa saja tahapan seleksi yang dilakukan dalam melakukan rekrutmen dan bagaimana penentuan hasil akhir rekrutmen.

Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menggambarkan tenLoktang objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis tersebut dapat berupa deskripsi analisis kemudian di interpretasi dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis.

2. Sumber Data

Ridwan (2008:69) menjelaskan sumber data yang ada pada penelitian bisa dibagi menjadi dua data yakni primer dan sekunder

a. Data Primer

Data Primer menjadi sumber data utama dalam sebuah penelitian. Data primer diperoleh penulis secara langsung melalui narasumber pertama yang ada dilapangan dengan memperhatikan hasil wawancara dan observasi. Data Primer diambil berdasarkan wawancara, catatan lapangan, pengamatan serta dokumen-dokumen. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan narasumber secara langsung. Sumber primer merupakan sumber data yang menyampaikan data kepada penulis secara langsung tanpa perantara apapun (Sugiyono, 2015:187). Adapun pada penelitian ini sumber data primer penulis adalah pengurus DPC partai Gerindra Kabupaten Bulungan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang berasal dari sumber-sumber lain yang dapat berupa berbagai macam bentuk seperti karangan para ahli, literatur, brosur yang dianggap berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melaksanaka penilitian di partai Gerakan Indonesia raya Kabupaten Bulungan. penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus. Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi adalah tempat yang sangat tepat untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat dan relevan terhadap permasalahan penelitian yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber data dengan cara melakukan percakapan maupun tanya jawab. Pada penelitian kualitatif wawancara bersifat mendalam dengan perasaan ingin mengeksplorasi informasi secara rinci dan jelas dari narasumber (Satori dan Komariah, 2009:47). Pada penelitian ini, wawancara struktur merupakan teknik wawancara yang dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Jika peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan didapatkan dan peneliti juga telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam penelitian tentang Analisis Rekrutmen Politik Partai Gerindra terhadap Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2020 peneliti ingin memperoleh informasi tentang proses rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra Kabupaten Bulungan dan tahapan seleksi yang dijalankan hingga penentuan akhir dalam memutuskan calon kepala daerah yang diusung. Lebih lanjut peneliti akan menggali informasi tentang sejauh mana keterlibatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra dalam menentukan kandidat calon kepala daerah.

Adapun responden yang akan di wawancarai adalah :

1. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulungan

2. Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Utara

5. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi diperuntukkan sebagai data langsung yang diperoleh dari tempat penelitian berupa buku-buku, laporan kegiatan, foto-foto, peraturan-peraturan serta film dokumenter (Ridwan, 2008:7). Dokumen juga dapat berupa kejadian peristiwa yang telah berlalu yang tersedia dalam bentuk gambar, foto, tulisan dan karya dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan misalkan sejarah kehidupan, biografi, catatan harian, kebijakan, peraturan, lebih lanjut dokumen yang berupa gambar seperti foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya seperti gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bahan pelengkap atas penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:326). Dalam penelitian tentang rekrutmen politik partai Gerindra kabupaten Bulungan dalam Pilkada tahun 2020 peneliti akan menggunakan data-data dokumentasi yang berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian dimana hal ini adalah sumber utama yang dipergunakan peneliti. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan berita melalui media online dan juga ad/art Partai Gerindra sebagai tambahan dalam sumber data.

6. Teknik Analisa Data

Pada penelitian kualitatif, data yang didapatkan melalui berbagai macam sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dan dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan pengamatan yang terus-menerus menyebabkan data tunggal. Data yang didapatkan secara umum adalah data

kualitatif, yang menyebabkan teknik analisa data yang digunakan belum memiliki pola yang jelas (Sugiyono,2013:243).Melakukan analisa data merupakan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan kerja keras. Analisa membutuhkan kreatifitas yang tinggi serta kekayaan intelektual yang tinggi. Pada penelitian ini teknik analisa yang dipakai adalah teknis kualitatif dengan merujuk pada Miles dan Humberman (1984) dalam Sugiyono (2013:246-252). Yang terdiri atas beberapa tahap, yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir yang membutuhkan kemampuan intelektual seperti kecerdasan dan kedalaman dalam melakukan wawancara. Mereduksi data artinya merangkum, memilah hal-hal yang bersifat pokok, dengan mengarahkan fokus kepada hal-hal yang penting. Setelah data direduksi akan menghasilkan gambar yang lebih jelas dan akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti uraian singkat, bagan dan lain-lain. Pada penelitian kualitatif penyajian data yang dipakai adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil pada tahap awal adalah kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan tersebut dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang akurat. Namun, jika kesimpulan yang diambil ditahap awal

memiliki bukti-bukti yang kuat dan akurat serta konsisten pada saat peneliti terjun kembali ketempat pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2014: 91-99).